

INVENTARISASI ASET DAERAH DI SMPN 1 CIPAKU KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS

Yusup Supriadi

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : djawara.kudjang@gmail.com

ABSTRAK

Seiring dengan kebutuhan pemerintah akan barang atau aset daerah, maka perlu dilakukan kegiatan pengelolaan aset sehingga aset-aset yang dimiliki oleh daerah dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah daerah. Seiring dengan bertambahnya jumlah urusan pemerintah di daerah otonom, sistem pengelolaan aset daerah pun perlu mengalami berbagai penyesuaian terhadap seluruh rangkaian atau siklus pengelolaan aset yang dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana inventarisasi Aset Daerah yang ada di SMPN 1 Cipaku agar tertata dengan optimal ?. Sedangkan tujuan dari penelitian adalah : Mendeskripsikan inventarisasi Aset Daerah yang ada di SMPN 1 Cipaku agar tertata dengan optimal. Tujuan Inventarisasi Aset : (1) Menginventarisasi dan mengamankan seluruh BMD pada SKPD yang hingga saat ini belum terinventarisasi dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Menyajikan nilai koreksi BMD pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (3) Melakukan sertifikasi BMD atas nama Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif peneliti hanya mendeksripsikan atau mengkonstruksi wawancara mendalam terhadap subjek penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses atau alur inventarisasi Aset Daerah di SMP Negeri 1 Cipaku Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah sudah dilakukan, akan tetapi pelaksanaannya masih terkendala pada saat input ke dalam aplikasi SIPKD. Sehingga tidak semua barang di SMPN 1 Cipaku terdapat label nomor kode barang inventaris. Informasi inventarisasi aset daerah tidak lengkap terutama dalam pencantuman Kartu Inventaris Ruangan dan pencantuman label kodefikasi di tiap barang karena tidak setiap ruangan di SMPN 1 Cipaku terdapat rekap daftar barang ruang atau Kartu Inventaris Ruangan. Untuk pelaksanaan pelaporan sudah dilakukan dengan baik. Pelaksanaan pelaporan barang inventaris dilakukan setiap triwulan dan tahunan.

Kata Kunci : *Inventarisasi, Aset Daerah, Proses Inventarisasi*

PENDAHULUAN

Dari sekian aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut, aset tanah adalah aset yang paling rawan terjadi penyerobotan. Bukti kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas adalah hal yang paling sering menjadi masalah yang berujung dengan perebutan hak milik. Aset pemerintah daerah merupakan salah satu elemen dari neraca pemerintah daerah. Neraca adalah salah satu elemen penyusunan Laporan Keuangan daerah. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa di dapat, seberapa nyaman tinggal di daerah tersebut terkait dengan kelengkapan dan prasarana publik, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban, pemerintah harus memperhatikan setiap aspek yang akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban. Pemerintah juga harus memeriksa kembali penatausahaan aset dalam hal ini barang milik daerah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Terkadang masyarakat kurang memperhatikan apa saja yang menjadi Barang Milik Daerah (aset) yang ada di daerah

masing-masing dan apakah Barang Milik Daerah tersebut sudah digunakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah dengan baik. Barang Milik Daerah (BMD) sesuai pasal 1 butir 11 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah: "Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah". BMD pada dasarnya digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/SKPD.

Setelah peneliti melakukan observasi ke lapangan, di SMPN 1 Cipaku Kecamatan Cipaku masih terlihat belum optimal dalam inventarisasi Aset Daerah yang ada di sekolah baik yang berasal dari negara atau pihak lain yang sifatnya tidak mengikat. Hal ini terindikasi dari:

1. Pendaftaran dan pencatatan aset daerah masih bersifat online, sehingga menyulitkan apabila ada pemeriksaan mendadak. Karena belum adanya buku khusus yang dicatat secara manual oleh petugas pengurus barang sebagai pendamping pencatatan secara online.
2. Alur inventarisasi yang dijalankan saat ini masih belum sesuai karena ada sebagian barang yang belum masuk ke dalam Buku Inventaris. Sehingga ada sebagian aset daerah yang belum tercatat dalam buku inventaris. Hal ini karena adanya sebagian barang dari pihak ketiga

yang tidak mencantumkan harga dan klasifikasi barang sehingga menyulitkan pengurus barang dalam melakukan pelaporan di akhir tahun.

3. Masih ada aset daerah yang sulit teridentifikasi lokasinya yang diakibatkan oleh mutasi barang tanpa diketahui dan di catat oleh pengurus barang.

KAJIAN PUSTAKA

1. Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan mencatat barang yang sudah dibeli. Mencatat barang bertujuan untuk memberikan informasi. Menurut Ibrahim Bafadal (2004: 55) bahwa, “inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku”.

Pendapat lain mengenai inventarisasi yang dipaparkan oleh Gie (Saiman, 2002: 85) bahwa, “Inventarisasi ialah sebuah daftar yang memuat nama-nama barang milik instansi”. Inventarisasi yang dimaksud merupakan sebuah daftar yang didalamnya memuat sejumlah informasi mengenai barang milik/kekayaan negara yang dikuasai oleh suatu instansi.

2. Aset

Pada dasarnya aset daerah adalah istilah ekonomi dan dengan demikian aset merupakan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Suterdi (2009: 29)

Secara umum aset adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan).

Aset juga merupakan barang yang dalam pengertian hukum adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang tercakup dalam aktiva atau kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi badan usaha atau individu perorangan. Dan aset adalah sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah. Dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah.

3. Inventarisasi Aset

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian (Soleh dan Rochmansjah, 2010 : 180). Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventarisasi yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Pendapat lain mengenai inventarisasi aset dikemukakan oleh Sugiama (2013:173) bahwa: Inventarisasi aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan,

pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu.

Melihat definisi dari Sugiama tersebut di atas, maka ada beberapa dimensi dari inventarisasi aset, yaitu:

- a. Pendataan
- b. Pencatatan
- c. Pelaporan
- d. Dokumentasi.

Pendapat lain tentang inventarisasi aset dikemukakan oleh Harsono, dkk (2004:163) yang berpendapat:

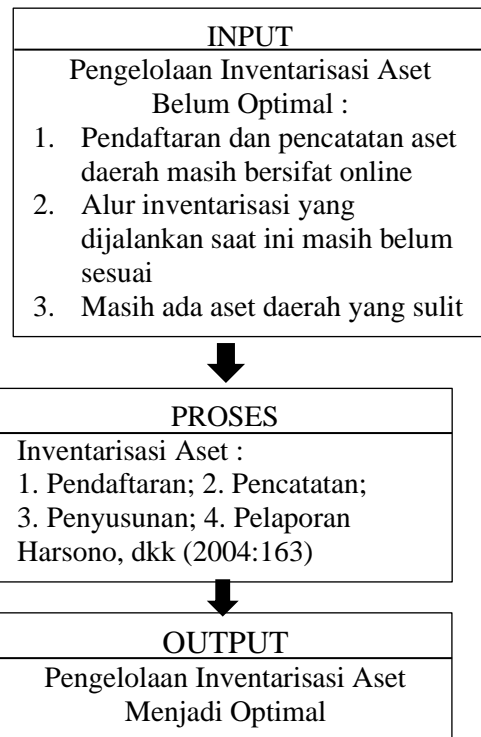
Inventarisasi aset adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi pendaftaran, pencatatan dalam daftar inventaris, penyusunan atau pengaturan barang-barang milik negara atau daerah serta melaporkan pemakaian barang-barang kepada pejabat yang berwenang secara teratur dan tertib menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku sehingga mempermudah dalam penyajian data kekayaan negara/pemerintah daerah baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan Inventarisasi Aset adalah:

- 1) Menginventarisasi dan mengamankan seluruh BMD pada SKPD yang hingga saat ini belum terinventarisasi dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Menyajikan nilai koreksi BMD pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 3) Melakukan sertifikasi BMD atas nama Pemerintah Daerah.

4. Kerangka Pemikiran



5. Proposisi

Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Cipaku Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis apabila dilaksanakan sesuai dengan teori yang telah ditetapkan tentang Inventarisasi Aset Daerah, maka semua aturan siklus inventarisasi dapat terlaksanakan secara baik dan benar dan pelaksanaan bisa berjalan secara optimal.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses pengkajian untuk membuktikan suatu kebenaran mengenai apa yang sedang diteliti. Metode penelitian yang tepat dan relevan sangat diperlukan

untuk mencapai tujuan tersebut. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Sugiono (2012: 9) mengemukakan :

“penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan pemahaman terhadap hasil temuan, berdasarkan data pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data selama di lapangan yaitu menganalisis data pada saat pengumpulan data berlangsung, pada saat memperoleh jawaban dari informan, sehingga peneliti bisa mengajukan pertanyaan berikutnya untuk melengkapi data yang ada. Bila jawaban belum memuaskan maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang kredibel.

2. Operasional Konsep

Operasional konsep dalam penelitian ini mengacu kepada teori yang dikemukakan oleh Harsono, dkk (2004:163), yaitu:

Inventarisasi aset adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi pendaftaran, pencatatan dalam daftar

inventaris, penyusunan atau pengaturan barang-barang milik negara atau daerah serta melaporkan pemakaian barang-barang kepada pejabat yang berwenang secara teratur dan tertib menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku sehingga mempermudah dalam penyajian data kekayaan negara/pemerintah daerah baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat empat dimensi dalam inventarisasi aset yakni:

1. **Pendaftaran**
Dalam dimensi pendaftaran ini memiliki beberapa indikator, yaitu:
 - a. Pemeriksaan
 - b. Klasifikasi
 2. **Pencatatan**
Dalam hal pencatatan aset daerah ada beberapa indikator, antara lain:
 - a. Kodefikasi Barang
 - b. Pencatatan Barang
 3. **Penyusunan**
Yang menjadi indikator dalam dimensi penyusunan adalah:
 - a. Rekapitulasi Barang
 - b. Periodisasi penyusunan
 4. **Pelaporan**
Dalam dimensi pelaporan terdapat 2 (dua) indikator, yaitu:
 - a. Waktu pelaporan
 - b. Bentuk pelaporan.
- ### **3. Data dan Sumber Data**
- Jenis data dan Sumber Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang peneliti kumpulkan langsung dari para informan yang berhubungan langsung dengan inventarisasi aset, dalam penelitian ini peneliti mengambil data dalam bentuk pendapat informan dengan cara wawancara terstruktur dan pengamatan langsung.
- b. Data sekunder adalah data yang berasal dari laporan - laporan maupun literatur yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepustakaan
- 2) Observasi
- 3) Wawancara
- 4) Dokumentasi

5. Teknik Pengolahan/Analisis Data

Analisis data menurut Miles dan Huberman (Hardani, dkk, 2020:163) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) reduksi data (*data reduction*); (2) penyajian data (*data display*); dan (3) penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan pendaftaran, pencatatan, penyusunan, dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan

daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merek tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.

Dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan inventarisasi aset daerah di SMPN 1 Cipaku, maka penulis melakukan penelitian dengan hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Pendaftaran

Pendaftaran merupakan langkah awal dari kegiatan pembukuan inventarisasi aset daerah. Dan barang yang harus di daftar adalah barang yang berasal dari pembelian dengan menggunakan anggaran negara/daerah.

Adapun beberapa indikator agar barang-barang bisa dikategorikan dan masuk ke dalam aset daerah, antara lain:

- a) Pemeriksaan
- b) Klasifikasi

Penelitian serupa tentang pendaftaran inventarisasi aset pernah dilakukan oleh Ikbar Andrian Sumardi tahun 2017 dengan judul : *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016* (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jenepono). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jenepono secara keseluruhan telah dilakukan dengan

maksimal dan sesuai dengan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016. Walaupun belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), Pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Jenepono tidak melakukan pengamanan hukum.

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan di SMPN 1 Cipaku Kabupaten Ciamis, penerapan pendaftaran Inventarisasi aset sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Oleh karenanya pendataan yang baik akan mendorong terhadap pengelolaan aset daerah yang akuntabel sebagaimana yang dikemukakan oleh Soleh dan Rochmansjah (2010:169), yakni Pengelolaan aset daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik, yang meliputi:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*);
- b. Akuntabilitas proses (*process accountability*); dan
- c. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

2. Pencatatan

Pada dimensi pencatatan yang dilakukan oleh peneliti di SMPN 1 Cipaku sudah berjalan dengan baik

walaupun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Untuk mendukung kegiatan pencatatan, maka dimensi pencatatan ini dibagi menjadi 2 (dua) indikator, yaitu:

- a) Kodefikasi Barang
- b) Pencatatan Barang

Penelitian serupa tentang pencatatan aset daerah dilaksanakan oleh Fasiha tahun 2013 dengan judul : *Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*. Bentuk atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode pengamatan langsung, wawancara dan kuesioner. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan dengan baik, begitu juga dengan implementasi pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan optimal sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah dan juga didapat hambatan-hambatan dalam implementasi pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini juga dibuktikan dalam hasil angket yang menghasilkan nilai sebesar 54,6% yang

berarti bahwa pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti kurang baik.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan tersebut, pelaksanaan pencatatan aset daerah di SMPN 1 Cipaku juga berjalan kurang baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya daftar inventarisasi ruang dan rekapitulasi barang. Sehingga hal ini menghambat dalam melakukan kegiatan pencatatan aset daerah.

3. Penyusunan

Penyusunan adalah proses, cara, perbuatan menyusun. Penyusunan biasanya berkaitan dengan kegiatan atau perbuatan seseorang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penyusunan inventarisasi aset di SMPN 1 Cipaku dilakukan pada setiap barang yang sudah dinyatakan sebagai barang milik daerah. Ada beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori penyusunan, yakni:

- a) Rekapitulasi Barang
- b) Periodisasi Penyusunan

Berdasarkan pada penelitian, pelaksanaan periodisasi penyusunan barang yang diterapkan di SMPN 1 Cipaku sudah berjalan optimal, dan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.

Kegiatan mengenai penyusunan inventarisasi aset daerah juga dilaksanakan oleh Arif Kurnia Rahman tahun 2020 dengan mengambil judul : Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Daerah Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan barang milik daerah serta mengetahui hambatan dalam pengelolaan barang milik daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau. Bentuk atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh hasil bahwa Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik secara administrasi akan tetapi secara implementasi belum sepenuhnya.

Dampak yang ditimbulkan dari terlaksananya penyusunan yang sesuai dengan ketentuan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diungkapkan oleh Soleh dan Rochmansjah (2010:173-174) yang menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas:

- 1) Azas fungsional
- 2) Azas kepastian hukum
- 3) Azas transparansi
- 4) Azas efisiensi
- 5) Azas akuntabilitas
- 6) Azas kepastian nilai

4. Pelaporan

Hasil penelitian di SMPN 1 Cipaku perihal pelaporan aset daerah, dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan optimal dan selalu berpedoman pada tata cara dan sistematika pelaporan yang ditetapkan oleh peraturan. Dalam pelaksanaan pelaporan tentang aset daerah di SMPN 1 Cipaku dibagi menjadi 2 indikator pendukung, yaitu:

- a) Waktu Pelaporan
- b) Bentuk Pelaporan

Kegiatan tentang pelaporan aset daerah dilaksanakan oleh Syadza Hikmawati Tamsir Tahun 2018 dengan judul : Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Aset Daerah yang telah berjalan sesuai aturan dan telah di laksanakan secara efektif dan efisiensi.

Kegiatan pelaporan aset daerah yang dilaksanakan oleh SMPN 1 Cipaku ini sejalan dengan pendapat dari Chamber dan Penman (Hilmi dan Ali : 2008) yang mengungkapkan bahwa ketepatan waktu pelaporan didefinisikan menjadi 2, yaitu:

1. Ketepatan waktu sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan, dan;
2. Ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan inventarisasi aset daerah di SMPN 1 Cipaku Kabupaten Ciamis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan inventarisasi aset daerah sudah dilakukan, akan tetapi pelaksanaannya masih terkendala pada saat *input* ke dalam aplikasi SIPKD. Sehingga tidak semua barang di SMPN 1 Cipaku terdapat label nomor kode barang inventaris.

Informasi inventarisasi aset daerah tidak lengkap terutama dalam pencantuman Kartu Inventaris Ruangan dan pencantuman label kodefikasi di tiap barang karena tidak setiap ruangan di SMPN 1 Cipaku terdapat rekap daftar barang ruang atau Kartu Inventaris Ruangan. Untuk pelaksanaan pelaporan sudah dilakukan dengan baik. Pelaksanaan pelaporan barang inventaris dilakukan setiap triwulan dan tahunan.

Dalam pelaksanaan inventarisasi aset daerah, masih mengalami kendala yang sekaligus menjadi kelemahan inventarisasi aset daerah di SMPN 1 Cipaku. Adapun kendala yang dihadapi adalah pertama masih kurangnya tenaga ahli dan terbatasnya kemampuan petugas dalam pengelolaan aset daerah sehingga ada aset daerah yang belum terdata dalam inventarisasi aset.

Keterbatasan tenaga administrasi di SMPN 1 Cipaku sehingga pegawai tidak terfokus dalam inventarisasi aset karena harus mengurus pekerjaan yang

lain juga. Selain itu, penyediaan ruangan kerja bagi pegawai untuk menjalankan pengelolaan barang milik daerah belum memadai dalam melaksanakan inventarisasi aset daerah.

Dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain : Berupaya memberdayakan pegawai dengan cara memberikan pelatihan kepada petugas dan pengurus barang dengan tujuan menambah kemampuan petugas dalam pengelolaan aset daerah.

Selanjutnya untuk mengatasi hambatan adalah dengan pembuatan jadwal dalam pengurusan aset daerah, hal ini dilakukan guna menutupi keterbatasan tenaga administrasi di SMPN 1 Cipaku sehingga pegawai menjadi terfokus dalam inventarisasi aset. Dan berikutnya menyediakan ruangan kerja khusus bagi pegawai untuk menjalankan pengelolaan aset daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Puji. 2012. *Manajemen Aset Daerah, Sistem dan Prosedur Barang Milik Daerah*. Surabaya. dbuku.

_____. 2018. *Memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Bandung. Fokusmedia.

_____. & Riyanto, SE, MM. 2012. *Manajemen Aset Daerah, Sistem dan Prosedur Barang Milik Daerah*. Surabaya. dbuku

Budi, SC. 2011. *Manajemen Unit Rekam Medis*. Yogyakarta : Quantum Sinergis Media.

BPKP Provinsi Jawa Barat. 2014. *Modul Pengelolaan Barang Milik daerah*.

Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta. CV. Pustaka Ilmu Group.

Harsono, dkk. 2004. *Administrasi Perkantoran 1*. Bandung: Alqaprint.

Hilmi dan Ali. 2008. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan: Studi Empiris pada Perusahaan-perusahaan yang Terdaftar di BEJ Periode 2004-2006*. Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak

Ibrahim Bafadal. 2004. *Manajemen Perlengkapan Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Komariah, Aan. & Satori, Djam'an. 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung,. Alfabeta.

Lukas, Dwiantara dan Rumsari Hadi Sumarto. 2004. *Manajemen Logistik*. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Morrison. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. Kencana.
- Mulyadi, 2002. *Auditing*, Buku Dua, Edisi Ke Enam. Jakarta. Salemba Empat.
- Neolaka, Amos. 2014. *Metode Penelitian dan Statistik*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Saiman. 2002. *Manajemen Sekretaris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santana K. Septiawan. 2010. *Menulis Ilmiah, Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sholeh, Chabib dan Rochmansjah, Heru, 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung. Fokusmedia.
- Siregar, Doli D. 2014. *Manajemen Aset*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Soemarso, SR. 1994. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiama, A. Gima . 2013. *Manajemen Aset Pariwisata*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta. Suaka Media.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung. Alfabeta.
- Suwanda, Dadang. 2013. *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan PEMDA*. Jakarta: PPM.
- Wahyuni, Sri. & Khoirudin, Rifki. 2020. *Pengantar Manajemen Aset*. Makassar. Nas Media Pustaka.
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta. Kencana.
- Perundang-undangan:
 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Daerah.
 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.